



KAPASITAS MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI ANCAMAN BENCANA ERUPSI GUNUNG MARAPI DI NAGARI PARIANGAN KECAMATAN PARIANGAN

Leony Melta Putri¹, Iswandi. U²

Program Studi Pendidikan Geografi FIS

Universitas Negeri Padang

Email: Leonymeltaputri17@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana erupsi Gunung Marapi di Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian ini menggunakan angket sebagai instrumen penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Nagari Pariangan yang berjumlah 5.562 jiwa. Subjek penelitian ini adalah 98 orang yang ditentukan dengan metode *random sampling*. Teknik yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dengan menghitung persentase. Hasil penelitian ini dilihat dari lima kerangka aksi Hyogo atau *Hyogo Framework*. Berdasarkan lima parameter tersebut menunjukkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana erupsi Gunung Marapi di Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan sebesar 64,58% aturan dan kelembagaan penanggulangan bencana pada kategori sedang, peringatan dini sebesar 51,45% pada kategori rendah, 47, 76% tentang pendidikan kebencanaan pada kategori rendah, 48,81% tentang pengurang faktor resiko dasar pada kategori rendah, dan pembangunan kesiapsiagaan terhadap bencana 56,90% pada kategori sedang. Dengan jumlah total persentase 53,90 % maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana erupsi Gunung Marapi di Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan masih tergolong rendah.

Kata kunci : Kapasitas, Masyarakat, Erupsi Gunung Marapi

ABSTRACT

This study aims to determine the capacity of the community in dealing with the threat of the eruption of Mount Marapi in Nagari Pariangan, Pariangan District. This study uses a quantitative method using a descriptive approach, this study uses a questionnaire as a research instrument. The population in this study was the community of Nagari Pariangan, amounting to 5,562 people. The subjects of this study were 98 people who were determined by random sampling method. The technique used is descriptive statistical analysis by calculating the percentage. The results of this study are seen from the five Hyogo Frameworks of action or Hyogo Framework. Based on these five parameters, it shows that the community's capacity to deal with the threat of the eruption of Mount Marapi in Nagari Pariangan, Pariangan District, is 64.58% of disaster management rules and institutions in the medium category, early warning is 51.45% in the low category, 47, 76% is about education. in the low category, 48.81% on reducing basic risk factors in the low category, and 56.90% on the development of disaster preparedness in the medium category. With a total percentage of 53.90%, it can be concluded that the community's capacity to face the threat of the eruption of Mount Marapi in Nagari Pariangan, Pariangan District is still relatively low..

Keywords: Capacity, Public, Merapi Volcano Eruption

¹Mahasiswa Jurusan Geografi FIS UNP

²Dosen Jurusan Geografi FIS UNP

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara besar yang mencakup banyak pulau. Dari segi geologi, Indonesia terbagi menjadi tiga zona: Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. . Indonesia juga dilalui oleh dua jalur pegunungan yang aktif yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Indonesia juga merupakan negara cincin api di dunia karena dikelilingi oleh deretan gunung api aktif dari barat hingga timur. (Dr. Dedi Hermon dalam “Geografi Bencana Alam”).Sebab letak geologi wilayah Indonesia tersebut, Indonesia menjadi negara yang rawan terjadinya bencana geologi, baik itu bencana gempa bumi, tsunami maupun bencana gunung meletus.

Upaya pemerintah Indonesia dalam penanganan bencana salah satunya dengan dikeluarkannya undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bahwa penanggulangan bencana merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko dapat menimbulkan bencana, kegiatan pencegahan bencana, rehabilitasi, dan tanggap darurat.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, risiko bencana mengacu pada potensi kerugian akibat

bencana di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dapat berupa kematian, cedera, sakit, ancaman nyawa, hilangnya keamanan, pengungsian, kerusakan atau kerugian harta benda, dan hancurnya aktivitas masyarakat. Resiko bencana dapat dikurangi dengan meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat dalam merespon ancaman bencana.

Berdasarkan hasil konferensi sedunia tentang Pengurangan Risiko Bencana (*World Conference on Disaster Reduction*) yang diselenggarakan pada tanggal 18-22 Januari 2005 di Kobe, Hyogo dan Jepang dalam rangka mengadopsi Kerangka Kerja Aksi 2005-2015 dengan tema: Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas Terhadap Bencana, memberikan suatu kesempatan untuk menggalakkan suatu pendekatan yang strategis dan sistematis dalam meredam kerentanan dan risiko terhadap bahaya. Konferensi tersebut menekankan perlunya mengidentifikasi cara-cara untuk membangun ketahanan bangsa dan komunitas terhadap bencana. Hasil yang diharapkan dari HFA adalah pengurangan secara substantif kerugian akibat bencana dalam kehidupan dan dalam bidang sosial,

ekonomi, serta lingkungan masyarakat dan negara (Elida: 2011).

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang rawan terjadinya ancaman bencana gunung meletus. Salah satu gunung api yang aktif di Sumatera Barat adalah Gunung Marapi yang sebagian wilayahnya termasuk kedalam wilayah administrasi Kabupaten Tanah Datar. Gunung Marapi memiliki ketinggian 2.891 mdpl, Gunung Marapi dikelilingi oleh Gunung Tandikek, Gunung Talang dan Gunung Singgalang. Gunung Marapi mempunyai satu kawah besar yang aktif dan juga beberapa kawah kecil lainnya. Status Gunung Marapi ini ditetapkan sebagai siaga level II yang berarti status gunung ini berada dalam status waspada dan jarak 3 KM dari pusat kawah harus dikosongkan.

Sebagai gunung api yang masih aktif, Gunung Marapi memiliki potensi bahaya yang sewaktu-waktu bisa mengancam keselamatan kehidupan masyarakat yang tinggal disekitar gunung tersebut apabila gunung ini mengalami erupsi. Apalagi di lereng Gunung Marapi ini merupakan daerah yang ramai dan padat penduduk. Salah satu daerah yang beresiko terkena ancaman erupsi Gunung Marapi adalah Nagari Pariangan yang terletak di Kecamatan Pariangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode yang digunakan yaitu dengan metode survei dengan pengambilan data menggunakan instrumen penelitian berupa angket.

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan pada bulan Juni hingga bulan Juli 2021. Populasi dan sampel sebanyak 5.652 jiwa. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *random sampling*. Setelah dihitung menggunakan rumus slovin didapat subjek sebanyak 98 jiwa.

Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dan menggunakan kuisioner. Teknik dalam pemberian skor yang digunakan dalam kuisioner penelitian ini menggunakan Skala Guttman. Skala pengukuran dengan tipe ini dapat dijawab dengan tegas, yaitu “ya-tidak”. Penelitian menggunakan skala guttman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan.(Sugiono: 2012)

Untuk menganalisis jawaban pada penelitian ini menggunakan SPSS versi 26 dan Microsoft Excel. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

kuantitatif dengan teknik analisis statistic deskriptif yaitu digunakan untuk melihat kecendrungan penyebaran indikator dan melihat secara umum penyebaran data untuk setiap variabel analisis statistic deskriptif (Arikunto 2010:81) dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase

f = Frekuensi jawaban angket

n = Jumlah Responden

Untuk analisis kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana erupsi Gunung Marapi, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Indeks Resiko Bencan Indonesia

No	Nilai Indeks	Kriteria
1.	> 85%	Tinggi
2.	55-85%	Sedang
3.	<55%	Rendah

Sumber: (BNPB: 2013)

Penentuan kategori hasil pada penelitian ini mengacu pada kerangka aksi Hyogo yaitu aturan dan kelembagaan penanggulangan bencana, peringatan dini, pendidikan kebencanaan, pengurangan faktor risiko dasar, dan pembangunan kesiapsiagaan terhadap bencana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Penelitian yang berjudul “Kapasitas Masyarakat dalam Menghadapi Ancaman Bencana Erupsi Gunung Marapi di Nagari Pariangan Kecamatan Parianagan” yang dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2021. Pelaksanaan uji coba angket penelitian dilakukan pada hari Senin 27 Juni 2021, Berikutnya pengambilan data penelitian dilaksanakan mulai tanggal 5 Juli sampai 20 Juli 2021. Penelitian ini dilakukan dengan menyebar angket atau kuisisioner kepada responden yakni masyarakat Nagari Pariangan untuk mengetahui kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana erupsi Gunung Marapi. Analisis hasil jawaban penelitian menggunakan bantuan aplikasi SPSS Versi 26 dan Microsoft Excel.

Data yang dikemukakan adalah hasil penelitian yang berkaitan dengan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana erupsi Gunung Merapi di Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan.

Data penelitian diperoleh melalui penyebaran angket yang kemudian dijadikan data kuantitatif. Sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, maka akan dibahas masing-masing variabel ataupun indikator tentang kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana erupsi gunung merapi di Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan yang ditinjau

dari aspek aturan dan kelembagaan penanggulangan bencana, peringatan dini, pendidikan kebencanaan, pengurangan faktor risiko dasar, dan pembangunan kesiapsiagaan sebagai berikut:

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Parameter Kapasitas Masyarakat dalam Menghadapi Ancaman Bencana Erupsi Gunung Marapi di Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan

No	Parameter Kapasitas	%
	Siswa	
1.	Aturan dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana	64,58%
2.	Peringatan Dini	51,45%
3.	Pendidikan Kebencanaan	47,76%
4.	Pengurangan Faktor Risiko Dasar	48,81%
5.	Pembangunan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	56,90%
	Rata-rata	53,90%
	Persentase	
	Kategori	Sedang

Sumber: Data Olahan (2021)

Dari Data diatas, untuk parameter aturan dan kelembagaan penanggulangan bencana tergolong sedang yaitu (64,58%), peringatan dini (51,45%), pembangunan kesiapsiagaan terhadap bencana(56,90%). Dan parameter yang tergolong rendah pendidikan

kebencanaan (47,76%), pengurangan faktor risiko dasar (48,81%) . Maka dapat disimpulkan bahwa Kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana erupsi Gunung Marapi berada pada kategori sedang dengan rata-rata persentase (53,90%).

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka selanjutnya diperoleh pembahasan sebagai berikut:

Bencana alam yang banyak terjadi di Indonesia memberikan peringatan bahwa Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi bencana. Pengurangan risiko bencana di Indonesia telah menjadi kegiatan dengan kontinuitas dan sasaran prioritas yang sangat penting. Konferensi Dunia tentang Pengurangan Bencana telah melahirkan Hyogo Framework for Action (HFA) atau kerangka kerja aksi Hyogo untuk tahun 2005 sampai 2015. Sasaran utama dari tindakan dan deklarasi tersebut adalah ketahanan masyarakat dan bangsa-bangsa didalam menghadapi bencana. Pendekatan komprehensif untuk mengurangi risiko bencana dicanangkan dalam kerangka aksi Hyogo yang didukung oleh 160 negara dan diadopsi pada tahun 2005. HFA dikembangkan untuk memastikan pengurangan kerugian sosial, ekonomi

dan lingkungan masyarakat serta negara-negara akibat bencana. Terdapat 5 prioritas aksi dalam kerangka aksi Hyogo, yaitu :

Parameter pertama yaitu aturan dan kelembagaan penanggulangan bencana, Berdasarkan hasil penelitian dari 98 masyarakat Nagari Pariangan yang menjadi responden pertanyaan pertama 81 orang responden dengan persentase 82,7% mengetahui apa yang dimaksud dengan bencana. Lalu pada pertanyaan kedua sebanyak 71 orang dengan persentase 72,4% responden yang mengetahui tentang adanya aturan undang-undang tentang penanggulangan bencana. Pada pertanyaan ketiga sebanyak 65 orang dengan persentase 66,3% responden menjawab ya mengenai soal telah diterapkannya upaya pengurangan resiko bencana di daerahnya. Pada pertanyaan keempat 59 orang dengan persentase 60,2% menjawab ya mengenai soal telah adanya kelompok pemangku kepentingan seperti BPBD melakukan praktik pengurangan resiko bencana di daerah yang melibatkan masyarakat dalam aktivitas pengurangan resiko bencana. Pada pertanyaan kelima sebanyak 62 orang menjawab ya mengenai apakah telah adanya kontribusi BPBD dan pihak pemerintah dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan

masyarakat dalam menghadapi anacam bencana erupsi Gunung Marapi dengan persentase 63.3%. Pada pertanyaan keenam sebanyak 65 orang mengetahui instansi/pihak mana saja yang berguna untuk mendapatkan informasi mengenai bencana erupsi gunung api dengan persentase 66,3%. Lalu pada pertanyaan ketujuh sebanyak 40 orang pernah mengikuti diskusi-diskusi kelompok (organisasi) yang membahas pembangunan kesiagaan terhadap ancaman bencana erupsi gunung api.

Sebagaimana terdapat pada kerangka aksi Hyogo untuk parameter pertama ini memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi prioritas nasional dan lokal dengan mendasarkan kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan lembaga hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 sebagai penanggung jawab dalam hal kebencanaan tingkat nasional dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk tingkat daerah. Selain itu sumber daya manusia juga termasuk kedalam prioritas aksi pertama, menjaga kapasitas sumber daya manusia yang ada untuk pengurangan risiko bencana di semua tingkatan dan diadakannya program peningkatan kapasitas.

Negara dituntut untuk menyalurkan sumber daya untuk pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dan program pengelolaan risiko bencana, perundangan dan peraturan peredaman risiko bencana.

Parameter kedua: peringatan dini dan kajian risiko bencana, dari data olahan diatas dari 98 masyarakat Nagari Pariangan yang menjadi responden pada pertanyaan kedelapan terdapat 72 orang dengan persentase 73,5% mengetahui adanya hal-hal yang mengenai tanda akan datangnya bahaya gunung meletus. Pada pertanyaan kesembilan sebanyak 65 orang dengan persentase 66,3% telah mengetahui adanya peta jalur evakuasi jika sewaktu-waktu terjadinya erupsi gunung api. Pada pertanyaan kesepuluh 69 orang responden dengan persentase 70,4% mengetahui rute jalur evakuasi terdekat. Pada pertanyaan kesebelas 69 orang responden dengan persentase 70,4% masyarakat Nagari Pariangan masih mengaitkan fenomena alam sebagai pertanda datangnya bencana. Pada pertanyaan keduabelas 59 orang dengan persentase 60,2% telah mengetahui tentang sistem peringatan dini. Pada pertanyaan nomor tiga belas 46 orang responden dengan persentase 46,9% sudah mengetahui letak sirine peringatan dinidi sekitar Nagari

Pariangan yang berguna untuk memberikan informasi tentang erupsi gunung api . Pertanyaan keempat belas sebanyak 35 orang responden dengan persentase 35,7% pernah mengikuti pelatihan kebencanaan khususnya bencana erupsi gunung api. Pertanyaan kelima belas sebanyak 55 orang responden dengan persentase 56,1% menyatakan bahwa pelatihan kebencanaan memberikan peranan penting terhadap kesiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana erupsi Gunung Marapi. Lalu pertanyaan nomor enam belas terdapat 67 responden yang menjawab ya dengan persentase 68,4% dapat membaca dan mengetahui maksud dari rambu-rambu dan papan informasi tentang bencana erupsi gunung api. Lalu pada pertanyaan ketujuh belas sebanyak 68 responden dengan persentase 69,4% yang mengetahui tempat-tempat yang sudah termasuk aman terhadap erupsi gunung api di nagari Pariangan.

LIPI-UNESCO/ISDR (2006) menyatakan peringatan dini merupakan bagian dari pengurangan risiko tanda terjadinya bencana tidak hanya mengenai peringatan yang akurat secara teknis, tetapi juga harus membangun pemahaman risiko yang baik dan benar dalam tindakan peringatannya. Pemahaman yang baik bagi masyarakat saat terjadi peristiwa

tersebut serta meminimalisir risiko korban jiwa yang berjatuh. Mengembangkan sistem peringatan dini yang berbasis masyarakat, terutama sistem dimana peringatan bisa diberikan tepat waktu dan dapat dipahami oleh masyarakat yang menghadapi risiko, mempertimbangkan karakteristik demografi, gender, budaya dan kehidupan masyarakat sasaran, termasuk pedoman bagaimana cara bertindak setelah mendapat peringatan, dan sistem yang mendukung pelaksanaan yang efektif.

Parameter ketiga: pendidikan kebencanaan, berdasarkan hasil olahan data penelitian di atas didapatkan hasil persentase pada parameter pendidikan kebencanaan yaitu 47,76% termasuk pada kategori rendah. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden terdapat 52 orang responden dengan persentase 53,1 pernah mencari informasi tentang kejadian bencana apa saja yang mungkin terjadi di daerah anda dari sumber informasi yang terpercaya. Pada soal nomor sembilan belas sebanyak 79 orang responden dengan persentase 80,6% mengetahui apa yang dimaksud dengan bencana erupsi gunung api. Pada pertanyaan dua puluh 52 orang dengan persentase 53,1% terdapat berbagai media permanen (baik media

cetak, elektronik, poster) untuk mempublikasikan pembangunan kesadaran masyarakat untuk melakukan praktik pengurangan risiko bencana. Pada pertanyaan kedua puluh satu sebanyak 77 orang responden dengan persentase 78,6% telah mengetahui dampak dari erupsi gunung api. Pertanyaan nomor dua puluh dua sebanyak 63 orang responden dengan persentase 64,3% terkait bencana erupsi gunung api dalam memilih lokasi tinggal saat ini. Pertanyaan nomor dua puluh tiga Sebanyak 84 orang responden dengan persentase 85,7% perlunya tindakan kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi bencana erupsi gunung api. Dan pertanyaan nomor dua puluh empat sebanyak 61 orang responden dengan persentase 62,2% masyarakat pernah mendapatkan pengetahuan mengenai pertolongan pertama dan penyelamatan diri pada saat terjadi bencana erupsi gunung api.

Hyogo dalam kerangka aksinya menyatakan aktivitas-aktivitas kunci untuk pendidikan kebencanaan yaitu meningkatkan pengetahuan tentang peredaman risiko bencana dalam bagian yang relevan pada masyarakat dengan informasi pengurangan risiko bencana. Menggerakkan pelaksanaan peninjauan risiko tingkat lokal dan program kesiapsiagaan terhadap

bencana di masyarakat. Mendorong pelaksanaan program dan aktivitas di lembaga masyarakat tentang bagaimana meminimalisir efek bahaya. Menggalakan program pelatihan dan pembelajaran tentang peredaman risiko bencana. Dan meningkatkan keterlibatan media untuk mendorong sebuah budaya ketahanan terhadap bencana dan keterlibatan komunitas yang kuat dalam kampanye publik yang terus menerus dan dalam konsultasi publik di segala tingkat masyarakat.

Parameter keempat:

pengurangan faktor risiko dasar, berdasarkan olahan data di atas, dari 98 masyarakat Nagari Pariangan terdapat 50 orang responden menyatakan bahwa tempat mereka melakukan aktivitas sehari-hari (tempat bekerja) termasuk tempat yang aman dari bahaya tsunami dengan persentase 51,0% pada pertanyaan nomor dua puluh lima. Pada pertanyaan ke dua puluh enam 51 orang responden dengan persentase 52,0% menyatakan bahwa sudah ada rencana untuk evakuasi ke daerah yang lebih aman saat terjadi erupsi gunung api. Lalu pada pertanyaan ke dua puluh tujuh sebanyak 66 responden yang menyatakan kejadian erupsi gunung api yang pernah mereka rasakan memberikan informasi

mengenai gambaran risiko yang dihasilkan oleh erupsi gunung api dan tahu bagaimana cara menyikapinya dengan persentase 67,3%. Pertanyaan dua puluh delapan sebanyak 56 orang responden dengan persentase 57,1% menyatakan bahwa mereka mengetahui daftar nomor darurat (polisi, ambulance, rumah sakit) yang bisa dihubungi saat terjadinya keadaan darurat bencana. Dan pertanyaan dua puluh sembilan sebanyak 62 orang responden dengan persentase 63,3% telah mengetahui model rumah yang disarankan untuk daerah sekitar gunung api, agar terhindar dari beban endapan abu gunung api.

Dalam Hyogo Frame Work atau kerangka aksi Hyogo aktivitas-aktivitas kunci untuk pengurangan faktor risiko dasar meliputi pengurangan risiko bersifat fisik, rencana maupun kebijakan pembangunan sosial, ekonomi, pengurangan risiko bencana yang dipadukan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, kesiapan prosedur untuk menilai dampak risiko bencana. Dengan aktivitas-aktivitas kunci tersebut dapat mendorong penggunaan dan pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan, termasuk melalui perencanaan penggunaan lahan yang lebih baik dan aktivitas-aktivitas pembangunan untuk

meredam risiko dan kerentanan terhadap bencana. Melakukan pendekatan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam terpadu yang memasukkan peredaman risiko bencana. Melindungi dan memperkuat fasilitas dan infrastruktur publik, terutama sekolah, klinik, rumah sakit, pembangkit air dan listrik, komunikasi dan transportasi untuk bertahan hidup, pusat-pusat peringatan dan pengelolaan bencana, dan lahan-lahan dan struktur yang mempunyai arti penting secara budaya melalui perancangan yang tepat, penyesuaian, dan pembangunan kembali untuk membuat mereka mempunyai ketahanan yang memadai terhadap bahaya.

Parameter kelima: pembangunan kesiapsiagaan terhadap bencana, berdasarkan tabel di atas 39 orang responden pernah mengikuti latihan –latihan evakuasi erupsi gunung api baik yang diadakan oleh sekolah maupun pihak lain dari luar sekolah dengan persentase 39,8% pada pertanyaan nomor tiga puluh. Pada pertanyaan nomor tiga puluh satu sebanyak 66 orang responden dengan persentase 67,3% masyarakat mengatakan bahwa perlunya diadakan secara rutin pelatihan evakuasi guna meningkatkan sesiagaan terhadap bencana. Pada pertanyaan nomor tiga

puluh dua sebanyak 71 orang responden dengan persentase 72,4% telah mengetahui langkah-langkah upaya penyelamatan diri dari bencana erupsi gunung api. Dan pertanyaan nomor tiga puluh tiga sebanyak 47 orang responden dengan persentase sebesar 48,0% mengatakan adanya upaya pengurangan darurat bencana yang pernah dilakukan oleh semua pihak telah efektif untuk menekan jumlah korban yang timbul.

Dalam KAH (Kerangka Aksi Hyogo) untuk parameter kelima ini pada saat terjadi bencana, dampak dan kerugian bisa dikurangi jika pihak berwenang, individu dan komunitas di daerah yang rawan bencana sudah dipersiapkan dengan baik dan siap untuk bertindak yang dilengkapi dengan pengetahuan dan kapasitas untuk mengelola bencana secara efektif. Aktivitas kunci yang dilakukan yaitu memperkuat kapasitas kebijakan, teknis dan kelembagaan di dalam pengelolaan bencana tingkat regional, nasional dan lokal, termasuk pada yang terkait dengan teknologi, pelatihan, dan sumber daya manusia serta material. Meningkatkan koordinasi antar lembaga dan institusi yang bergerak di bidang peringatan dini, peredaman risiko bencana, respon bencana, serta pembangunan dan bidang lain yang relevan di semua

tingkat. Meningkatkan latihan kesiapsiagaan terhadap bencana secara rutin, termasuk latihan evakuasi, dengan tujuan untuk memastikan respon bencana yang cepat dan baik dan memastikan akses terhadap pangan dasar dan bantuan non-pangan secara semestinya sesuai kebutuhan. Mendorong dibentuknya dana keadaan darurat apabila perlu, untuk mendukung tindakan-tindakan respon, pemulihan dan kesiapsiagaan. Mengembangkan mekanisme khusus agar bisa melibatkan partisipasi aktif dan kepemilikan pemangku kepentingan yang relevan dalam peredaman risiko bencana, termasuk komunitas, khususnya dalam membangun semangat kesukarelaan.

Meskipun kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana erupsi Gunung Marapi termasuk dalam kategori sedang berdasarkan kelima parameter kerangka aksi Hyogo, upaya pengurangan risiko bencana harus perlu ditingkatkan guna meminimalisir akibat yang ditimbulkan dari bencana khususnya erupsi gunung api. Dikategorikan sedang karena tidak semua masyarakat yang menjadi responden mengetahui tata cara dalam upaya penyelamatan diri saat dan setelah terjadi bencana erupsi Gunung Marapi, juga tidak semua mengetahui rute jalur evakuasi terdekat dari lokasi

tempat tinggal. Maka dari itu perlunya pelatihan dan simulasi kebencanaan yang diberikan untuk masyarakat secara rutin mengingat Nagari Pariangan yang berada di lereng Gunung Marapi yang memiliki ancaman bencana erupsi Gunung Marapi, dan juga perlu diberikan pemahaman tentang cara membaca rambu-rambu kebencanaan dan disediakannya rambu-rambu serta papan informasi kebencanaan di Nagari Pariangan mengingat tidak adanya rambu-rambu kebencanaan seperti titik kumpul dan petunjuk arah evakuasi. Kesadaran masyarakat dan kesungguhan dalam mengikuti pelatihan juga sangat diperlukan agar masyarakat memiliki kemampuan atau kapasitas yang baik dalam upaya penyelamatan diri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana erupsi Gunung Marapi di Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kapasitas masyarakat Nagari Pariangan pada parameter pertama yaitu aturan dan kelembagaan penanggulangan bencana

berada pada kategori sedang (64,58%).

2. Tingkat kapasitas masyarakat Nagari Pariangan pada parameter kedua yaitu peringatan dini kapasitas masyarakat berada pada kategori sedang (51,45%).
3. Tingkat kapasitas masyarakat Nagari Pariangan pada parameter ketiga yaitu pendidikan kebencanaan berada pada kategori rendah (47,76%).
4. Tingkat kapasitas masyarakat Nagari Pariangan pada parameter keempat yaitu pengurangan faktor risiko dasar berada pada kategori rendah yaitu (48,81%).
5. Tingkat kapasitas masyarakat Nagari Pariangan pada parameter kelima yaitu pembangunan kesiapsiagaan menghadapi bencana berada pada kategori sedang (56,9%).

Kapasitas masyarakat Nagari Pariangan dalam menghadapi anvcaman bencana erupsi Gunung Marapi berdasarkan rata-rata persentase keseluruhan parameter berada pada kategori sedang (53,90%).

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Paraktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2013). *Indeks Risiko Bencana Indonesia*
- Herman, Dedi. 2015. *Geografi Bencana Alam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana